

**Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
(Study Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015-2019)**

Endang Sri Wahyuni¹, Resti Fatiha²

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis
endang.sri@polbeng.ac.id¹, restifatiha@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to measure the financial performance of Bengkalis Regency Government for the 2015-2019 fiscal year by using financial ratio analysis. This research is a quantitative descriptive study white data collection techniques in the form of secondary data in the form of archival data and documentation. Based on the results of calculation financial ratios to Bengkalis Regency Government for the 2015-2019 fiscal year, the results show that the ratio decentralization and ratio of regional financial independence is still very low. Then, regional original revenue effectiveness ratio is classified as ineffective, while the regional original revenue efficiency ratio is classified as very efficient. The compatibility ratio between operating expenditures and capital expenditures shows that the Bengkalis Regency Government tends to spend more on operating expenditures than capital expenditures. Meanwhile, when viewed from the ratio of direct and indirect expenditures, it shows that Bengkalis Regency uses funds for direct expenditure activities more than indirect expenditures. Then, average ratio of income growth and expenditure growth shows positive growth, and the efficiency ratio of regional spending shows that Bengkalis Regency has been efficient in spending its regional financial budget and has made budget savings.

Keywords: Measurement, Performance, Financial Ratio

1. PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Ulum, 2009). Perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan menilai kondisi keuangan pemerintah. Analisis pada suatu laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019).

Permasalahan mengenai kinerja Pemerintah Daerah kian menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila mampu melakukan peengelolaan keuangan daerahnya sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan begitu juga pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah otonom yang dalam pemerintahannya dituntut untuk dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus dapat mengelola potensi-potensi yang menjadi sumber PAD secara optimal. Meskipun demikian, masih banyak ditemukannya permasalahan seperti tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, banyaknya sumber-sumber yang dapat menjadi potensi penerimaan PAD dalam keadaan tidak kondusif, pariwisata di beberapa tempat tidak dapat dijangkau dan potensi sumber penerimaan daerah lainnya seperti jasa usaha penyebrangan air, tempat wisata dan olahraga yang belum terawat dan terkelola dengan baik. Selain itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan adalah menggunakan analisis rasio keuangan seperti rasio derajat desentralisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah yang bermanfaat untuk mengukur tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dalam melaksanakan otonomi daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah yang ingin dicapai serta besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan asli daerah tersebut. Kemudian, pengukuran kinerja keuangan juga bisa dilakukan dengan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam beberapa tahun anggaran dengan menjaga keseimbangan belanjanya sehingga menjalankan fungsi anggaran sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilisasi dengan melakukan perhitungan rasio pertumbuhan dan rasio keserasian belanja, serta menggunakan rasio efisiensi belanja daerah untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran.

Analisis rasio keuangan juga sudah banyak digunakan dalam mengukur kinerja keuangan di daerah lainnya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Mutiha (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Selain itu penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Anshori (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan PAD dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemungutan PAD relatif sedikit sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun demikian tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2015-2019 yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, serta rasio efisiensi belanja daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Adapun bentuk dari pengukuran kinerja keuangan tersebut berupa analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan daerah, salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019).

Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ketahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis serta digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Sedangkan pengertian lainnya menyebutkan bahwa rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan bermakna (Mahsun, 2013).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan data arsip atau dokumentasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau melakukan analisis atas suatu fenomena, peristiwa, maupun kejadian secara faktual menggunakan angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan. Penelitian ini dimaksudkan

untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi belanja daerah. Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis menggunakan analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019) :

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat+Provinsi+ Pinjaman}} \times 100$$

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

4. Rasio Keserasian Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi atau Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi atau Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung atau Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung atau Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

5. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - \text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - \text{Realisasi Belanja } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100$$

6. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan serta menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Daerah | Rasio | Kriteria |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| 2015 | Rp 258.889.532.216,18 | Rp 2.684.515.038.566,08 | 9,64% | Sangat Kurang |
| 2016 | Rp 199.026.650.970,10 | Rp 2.880.599.611.607,04 | 6,90% | Sangat Kurang |
| 2017 | Rp 271.865.595.908,08 | Rp 3.230.782.679.458,02 | 8,41% | Sangat Kurang |
| 2018 | Rp 319.280.511.092,11 | Rp 3.359.727.964.530,99 | 9,50% | Sangat Kurang |
| 2019 | Rp 226.245.884.732,22 | Rp 3.774.437.763.944,69 | 5,99% | Sangat Kurang |

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil Perhitungan rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah masih tergolong pada kriteria sangat kurang, karena nilai rasio berada dibawah 10% dan ini menandakan bahwa penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sangat kurang untuk membiayai pembangunan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Hal ini disebabkan karena PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Bengkalis masih relatif kecil. Oleh karena itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih giat dalam meningkatkan PADnya dengan mengembangkan, merawat dan mengelola sumber penerimaan PAD yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi | Rasio | Pola Hubungan |
|----------------|------------------------|---|--------|---------------|
| 2015 | Rp 258.889.532.216,18 | Rp 2.414.593.615.149,90 | 10,72% | Instruktif |
| 2016 | Rp 199.026.650.970,10 | Rp 2.639.454.503.255,94 | 7,54% | Instruktif |
| 2017 | Rp 271.865.595.908,08 | Rp 2.909.490.189.881,00 | 9,34% | Instruktif |
| 2018 | Rp 319.280.511.092,11 | Rp 3.040.447.453.438,88 | 10,50% | Instruktif |
| 2019 | Rp 226.245.884.732,22 | Rp 3.463.146.359.212,47 | 6,53% | Instruktif |

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis masih tergolong kedalam pola hubungan instruktif yang menggambarkan peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada perananan Pemerintah Daerah. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi masih sangat tinggi dan rendahnya pendapatan pajak serta retribusi daerah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya PAD di Kabupaten Bengkalis.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan daerah dikatakan efektif, jika rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD | Anggaran/Target PAD | Rasio | Kriteria |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 2015 | Rp 258.889.532.216,18 | Rp 337.287.917.893,16 | 76,75% | Kurang Efektif |

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD | Anggaran/Target PAD | Rasio | Kriteria |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 2016 | Rp 199.026.650.970,10 | Rp 335.584.167.284,53 | 59,30% | Tidak Efektif |
| 2017 | Rp 271.865.595.908,08 | Rp 373.540.392.000,00 | 72,78% | Tidak Efektif |
| 2018 | Rp 319.280.511.092,11 | Rp 444.510.450.102,00 | 71,82% | Tidak Efektif |
| 2019 | Rp 226.245.884.732,22 | Rp 429.370.673.127,00 | 52,69% | Tidak Efektif |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 sampai dengan 2019 masih rendah dan tergolong dalam kriteria tidak efektif karena nilai rasio berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Kabupaten Bengkalis dinilai kurang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah di targetkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi dalam hal pemungutan pajak dan retribusi, peremajaan data dan validasi data objek pajak retribusi belum memadai, kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah belum memadai.

2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien dan baik kinerja pemerintah daerah dalam melakukan PAD. Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Biaya Pemungutan PAD | Realisasi PAD | Rasio | Kriteria |
|----------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 2015 | Rp 34.432.948.603,00 | Rp 258.889.532.216,18 | 13,30% | Efisien |
| 2016 | Rp 11.381.660.000,00 | Rp 199.026.650.970,10 | 5,71% | Sangat Efisien |
| 2017 | Rp 1.952.723.875,00 | Rp 271.865.595.908,08 | 0,71% | Sangat Efisien |
| 2018 | Rp 2.202.373.071,00 | Rp 319.280.511.092,11 | 0,68% | Sangat Efisien |
| 2019 | Rp 2.131.682.710,00 | Rp 226.245.884.732,22 | 0,94% | Sangat Efisien |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi PAD Kabupaten Bengkalis dari tahun 2015 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berhasil melakukan efisiensi PAD karena rata-rata rasio efisiensi PAD berada dibawah 10% yang tergolong sangat efisien. Hal ini dibuktikan dengan biaya pemungutan PAD yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya selalu menurun sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan meskipun secara fluktuatif.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari Rasio Kecerasan Belanja

1. Rasio Belanja Operasi

Analisis belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Hasil perhitungan rasio belanja operasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 5. berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Total Belanja Operasi | Total Belanja Daerah | Rasio |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 2015 | Rp 2.702.062.556.685,00 | Rp 4.545.686.271.366,00 | 59,44% |
| 2016 | Rp 2.373.545.967.548,82 | Rp 3.146.734.562.970,77 | 75,42% |
| 2017 | Rp 2.234.571.262.679,43 | Rp 3.223.929.573.253,43 | 69,31% |

| Tahun Anggaran | Total Belanja Operasi | Total Belanja Daerah | Rasio |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 2018 | Rp 1.846.310.915.885,95 | Rp 3.159.072.534.491,27 | 58,44% |
| 2019 | Rp 2.191.978.637.329,98 | Rp 3.757.848.253.757,78 | 58,33% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 64,18%. belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari tahun 2015-2019 lebih tinggi dibandingkan dengan rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi ini disebabkan oleh tingginya anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan jenis belanja operasi lainnya.

2. Rasio Belanja Modal

Analisis rasio belanja modal menginformasikan kepada pembaca laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Hasil perhitungan rasio belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Total Belanja Modal | Total Belanja Daerah | Rasio |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 2015 | Rp 1.815.703.950.258,00 | Rp 4.545.686.271.366,00 | 39,94% |
| 2016 | Rp 765.742.945.445,95 | Rp 3.146.734.562.970,77 | 24,33% |
| 2017 | Rp 982.284.446.696,00 | Rp 3.223.929.573.253,43 | 30,46% |
| 2018 | Rp 903.407.348.786,32 | Rp 3.159.072.534.491,27 | 28,59% |
| 2019 | Rp 1.108.175.580.894,99 | Rp 3.757.848.253.757,78 | 29,48% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal adalah sebesar 30,56%. Belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja operasi. Jenis belanja modal tertinggi setiap tahunnya didominasi oleh belanja gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan.

Dari hasil perhitungan rasio belanja operasi dan belanja modal tahun anggaran 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis cenderung lebih banyak melakukan pengeluaran-pengeluaran rutin (belanja operasi) untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dibandingkan belanja modal. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sartika dan Pratama (2019) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Kecil tahun anggaran 2012-2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Kabupaten Siak Kecil belum terpenuhi.

3. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Hasil perhitungan rasio belanja langsung pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 7. berikut ini :

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Langsung Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Total Belanja Langsung | Total Belanja Daerah | Rasio |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 2015 | Rp 2.760.850.550.118,00 | Rp 4.545.686.271.366,00 | 60,73% |
| 2016 | Rp 1.643.876.064.579,27 | Rp 3.146.734.562.970,77 | 52,24% |
| 2017 | Rp 1.882.232.787.283,43 | Rp 3.223.929.573.253,43 | 58,38% |
| 2018 | Rp 1.790.237.407.295,27 | Rp 3.159.072.534.491,27 | 56,66% |
| 2019 | Rp 2.149.729.584.001,97 | Rp 3.757.848.253.757,78 | 57,20% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja langsung dapat diketahui bahwa belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai rasio sebesar 60,73% sedangkan belanja langsung terendah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai rasio sebesar 52,24%. Kenaikan dan penurunan nilai rasio ini akan berbanding lurus dengan kenaikan dan penurunan pada rasio belanja tidak langsung. Adapun hasil perhitungan rasio belanja tidak langsung pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 8. berikut:

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Total Belanja Tidak Langsung | Total Belanja Daerah | Rasio |
|----------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 2015 | Rp 1.784.835.721.248,00 | Rp 4.545.686.271.366,00 | 39,26% |
| 2016 | Rp 1.502.858.498.391,50 | Rp 3.146.734.562.970,77 | 47,75% |
| 2017 | Rp 1.341.696.785.970,00 | Rp 3.223.929.573.253,43 | 41,61% |
| 2018 | Rp 1.368.835.127.196,00 | Rp 3.159.072.534.491,27 | 43,33% |
| 2019 | Rp 1.608.118.669.755,81 | Rp 3.757.848.253.757,78 | 42,79% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung terendah berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan terjadi pada tahun 2015 dengan nilai rasio 39,26%. Sedangkan belanja tidak langsung tertinggi berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan terjadi pada tahun 2016 dengan nilai rasio 47,75%.

Dari analisis hasil perhitungan rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu menjaga keseimbangan antar belanjanya dan telah mampu menjalankan fungsi anggarannya sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa semestinya belanja langsung suatu daerah sebaiknya lebih besar daripada belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari Rasio Pertumbuhan

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 9. berikut:

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Realisasi Pendapatan X_n | Realisasi Pendapatan X_{n-1} | Rasio |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| 2015 | Rp 2.684.515.038.566,08 | Rp 3.985.029.241.140,00 | 32,63% |
| 2016 | Rp 2.880.599.611.607,04 | Rp 2.684.515.038.566,08 | 7,30% |
| 2017 | Rp 3.230.782.679.458,02 | Rp 2.880.599.611.607,04 | 12,15% |

| Tahun Anggaran | Realisasi Pendapatan X_n | Realisasi Pendapatan X_{n-1} | Rasio |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|--------|
| 2018 | Rp 3.359.727.964.530,99 | Rp 3.230.782.679.458,02 | 3,99% |
| 2019 | Rp 3.774.437.763.944,69 | Rp 3.359.727.964.530,99 | 12,34% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa selama periode tahun anggaran 2015-2019 terjadi kenaikan pendapatan daerah setiap tahunnya. Jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun yang terus mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dapat dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatan Kabupaten Bengkalis masih bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi.

2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 10. berikut:

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja X_n | Realisasi Belanja X_{n-1} | Rasio |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 2015 | Rp 4.545.686.271.366,00 | Rp 3.544.642.029.555,65 | 28,24% |
| 2016 | Rp 3.146.734.562.970,77 | Rp 4.545.686.271.366,00 | -30,77% |
| 2017 | Rp 3.223.929.573.253,43 | Rp 3.146.734.562.970,77 | 2,45% |
| 2018 | Rp 3.159.072.534.491,27 | Rp 3.223.929.573.253,43 | -2,01% |
| 2019 | Rp 3.757.848.253.757,78 | Rp 3.159.072.534.491,27 | 18,95% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja diatas, dapat dilihat bahwa selama periode T.A 2015-2019, rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pertumbuhan belanja negatif terjadi pada tahun 2016 dan 2018 dengan nilai rasio sebesar -30,77% dan -2,01%. Pertumbuhan negatif pada tahun 2016 dan 2018 ini disebabkan karena realisasi belanja daerah pada tahun tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan belanja positif terjadi pada tahun 2019 dengan rasio keuangan 18,95%. Meskipun demikian, rata-rata rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis jika ditinjau dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 12. berikut:

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja | Anggaran Belanja | Rasio |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 2015 | Rp 4.545.686.271.366,00 | Rp 5.376.051.630.077,63 | 84,55% |
| 2016 | Rp 3.146.734.562.970,77 | Rp 4.056.227.263.166,58 | 77,57% |
| 2017 | Rp 3.223.929.573.253,43 | Rp 3.972.064.330.460,70 | 81,16% |
| 2018 | Rp 3.159.072.534.491,27 | Rp 3.506.490.789.791,00 | 90,09% |
| 2019 | Rp 3.757.848.253.757,78 | Rp 4.064.983.543.321,46 | 92,44% |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 11. dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja daerah telah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Meskipun demikian, realisasi belanja tahun anggaran 2015-2019 tidak ada yang melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. Belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp4.545.686.271.366, sedangkan belanja daerah terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.159.072.534.491,27. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan penghematan anggaran belanjanya pada tahun bersangkutan. Penghematan anggaran paling besar terjadi pada tahun 2016 dimana selisih anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja sebesar Rp 909.492.700.195. Hal ini sesuai dengan Mahmudi (2019) yang menyatakan, Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2015-2019 dilihat dari perhitungan rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam kriteria sangat kurang dan berada pada pola hubungan instruktif. Kemudian, jika diukur berdasarkan rasio efektivitas PAD Kabupaten Bengkalis tergolong dalam kriteria tidak efektif, sedangkan rasio efisiensi PAD termasuk dalam kriteria sangat efisien. Rasio keserasian antara belanja operasi dan belanja modal menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis cenderung lebih banyak melakukan belanja operasi di dibandingkan belanja modal, sedangkan jika dilihat dari rasio belanja langsung dan tidak langsung menunjukkan Kabupaten Bengkalis lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Kemudian, rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan secara positif, dan rasio efisiensi belanja daerah menunjukkan Kabupaten Bengkalis telah efisien dalam membelanjakan anggaran keuangan daerahnya serta telah melakukan penghematan anggaran.

Saran

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus lebih giat dalam mengajak dan mengimbau kepada masyarakat agar taat dalam membayar pajak dan retribusi daerah seperti melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, peneraan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayarannya, serta meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan menggunakan teknologi informasi yang memadai serta mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun yang belum diolah dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Zakaria. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan)*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mutiha, Artaingan H. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014*. Jurnal Vokasi Indonesia, Vol 4, No 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta. Menkumham.